

PERUNDINGAN SIX-PARTY TALKS: UPAYA MENYELESAIKAN ISU NUKLIR KOREA UTARA (2003-2009)

Irwan Sulaiman Zebua

Abstrak: Six-Party Talks merupakan inisiatif diplomatik multilateral yang berlangsung dari tahun 2003 hingga 2009, bertujuan menyelesaikan isu program nuklir Korea Utara yang menjadi perhatian global. Perundingan ini melibatkan enam negara: Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Rusia. Beberapa putaran perundingan diadakan dengan tujuan utama untuk mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea secara damai. Selama perundingan, beberapa kemajuan signifikan tercapai, termasuk kesepakatan pada tahun 2005 di mana Korea Utara setuju untuk menghentikan semua senjata nuklir dan program nuklirnya, sebagai imbalannya menerima bantuan energi dan peningkatan hubungan diplomatik. Namun, perundingan ini menghadapi berbagai hambatan seperti ketidakpercayaan antar pihak, pelanggaran kesepakatan oleh Korea Utara, dan perubahan kebijakan di negara-negara peserta. Pada tahun 2009, perundingan menemui jalan buntu setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir kedua, yang mengakibatkan sanksi internasional lebih lanjut dan penghentian resmi perundingan. Meskipun perundingan ini tidak mencapai tujuan akhirnya, upaya tersebut penting sebagai contoh diplomasi multilateral dan menunjukkan kompleksitas dalam menyelesaikan isu proliferasi nuklir. Analisis mendalam terhadap perundingan ini memberikan wawasan penting tentang dinamika diplomatik di Asia Timur dan peran komunitas internasional dalam menangani masalah keamanan global.

Kata Kunci: Asia Timur, Denuklirisasi, Korea Utara, Proliferasi Nuklir, Six-Party Talks.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1896, fisikawan Perancis pertama kali melakukan eksperimen dengan energi nuklir dan menggunakan teknologi ini sebagai sumber energi. Negara-negara besar mendorong pengembangan energi baru untuk mengatasi peningkatan permintaan energi. Energi nuklir menghasilkan lebih banyak panas dan listrik daripada sumber energi lainnya, sehingga negara-negara terbesar di dunia bersaing dalam pengembangan teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka. Namun pada bulan Desember 1938, dua fisikawan Jerman, melakukan eksperimen inovatif untuk memisahkan atom uranium yang memiliki potensi untuk menghasilkan ledakan besar, mengikuti kemajuan teknologi saat itu. Jerman pada saat itu tertarik untuk mengembangkan senjata peledak yang tidak dimiliki oleh negara lain, dan akhirnya teknologi ini diadaptasi menjadi senjata nuklir.

AS, Inggris, dan Kanada membentuk proyek bersama pada tahun 1942 untuk mengembangkan bom atom setelah mengetahui bahwa Jerman sedang melakukan penelitian nuklir. Tujuan proyek ini adalah untuk menanggapi program nuklir Nazi Jerman. Negara besar lainnya seperti Uni Soviet, Perancis, dan Tiongkok kemudian mengikuti langkah Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada dengan tujuan mempertahankan diri dari potensi serangan dari luar setelah suksesnya Proyek Manhattan. Negara-negara tersebut memiliki program nuklir yang jelas mendorong negara lain seperti Korea Utara untuk mengikuti jejak mereka. Korea Utara memulai program nuklirnya selama enam tahun, dari tahun 1959 hingga 1965. Selama periode ini, Uni Soviet memberikan bantuan besar dalam pembangunan fasilitas nuklir di

Yongbyon, termasuk konstruksi dan pengawasan.

Setelah Korea Utara menyempurnakan, mengubah, dan memproduksi reaktor nuklir sendiri pada tahun 1970, kemajuan dalam teknologi nuklir mulai terlihat. Hal ini memungkinkan Korut untuk menguji coba nuklirnya di tahun 1998. Negara-negara lain mengkritik keras pengujian nuklir yang dilakukan Korut, terutama negara di kawasan Asia Timur yang khawatir bahwa hal ini dapat mengganggu stabilitas regional (Nabil, 2014). Untuk mengatasi situasi yang semakin tidak menguntungkan di Asia Timur, upaya diplomasi dilakukan. Amerika Serikat memainkan peran kunci dengan menekankan pentingnya denuklirisasi Korea Utara, yaitu proses di mana negara tersebut menghentikan kepemilikan senjata nuklir (Kimball, 2012).

Pada tahun 2003, dimulai Six-Party Talks sebagai inisiatif diplomasi. Inisiatif ini melibatkan AS, Rusia, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan dalam upaya bersama untuk mengembalikan Korut ke meja perundingan. Perundingan dimulai pada bulan Agustus 2003 sebagai langkah untuk mencapai solusi diplomatik terhadap isu nuklir Korea Utara. Pertemuan Six-Party Talks diadakan sebagai respons terhadap Korut yang memutuskan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir pada Januari 2003, dengan tujuan untuk mengakhiri program nuklir negara tersebut melalui proses negosiasi (Gershman, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-deskriptif untuk mengkaji proses dan dinamika Perundingan Six-Party Talks dalam upaya penyelesaian isu nuklir Korea Utara pada periode 2003 hingga 2009. Pemilihan metode ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memahami fenomena diplomasi multilateral secara mendalam dalam konteks hubungan internasional dan keamanan regional di Asia Timur.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang munculnya perundingan, perkembangan tahapan negosiasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam proses diplomasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berusaha merekonstruksi kronologi peristiwa secara objektif dan analitis, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap peran masing-masing negara peserta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, arsip diplomatik, laporan kebijakan luar negeri, serta pernyataan resmi dari negara-negara yang terlibat. Selain itu, laporan media internasional dan dokumentasi organisasi-organisasi multilateral turut dijadikan bahan analisis untuk memperkaya sudut pandang terhadap peristiwa yang diteliti.

Dalam proses analisis, digunakan metode analisis tematik kronologis, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam perundingan—seperti isu denuklirisasi, keamanan regional, dan strategi negosiasi—serta menyusunnya secara berurutan sesuai perkembangan waktu. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat perubahan sikap dan kebijakan para aktor, serta mengidentifikasi momen-momen krusial dalam jalannya negosiasi.

Melalui metode ini, penelitian tidak hanya berusaha menjelaskan bagaimana proses perundingan berlangsung, tetapi juga mengungkap konteks politik dan strategi diplomasi yang digunakan oleh masing-masing pihak. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi hubungan internasional, khususnya dalam memahami kompleksitas diplomasi multilateral dalam menghadapi isu-isu sensitif

seperti proliferasi senjata nuklir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Six-Party Talks

Korea Utara mulai mengembangkan senjata nuklir setelah keluar dari (NPT) pada Januari 2003. Langkah ini memunculkan hal yang akhirnya terarah pada uji coba nuklir mereka. Kekhawatiran muncul bahwa situasi ini dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Sebagai respons, untuk mengembalikan Korut ke meja perundingan yang dikenal sebagai Six-Party Talks, dimana enam negara tersebut berpartisipasi pada bulan Agustus 2003. Pada 16 Oktober 2002, Presiden AS saat itu menyatakan bahwa Korea Utara telah mengakui memiliki proyek senjata nuklir yang dirahasiakan berbasis pada pengayaan uranium.

Menurut Park dan Kim (2012), Wakil Menteri Luar Negeri AS James Kelly menerima laporan ini secara langsung di Pyongyang pada 5 Oktober 2002. Ternyata program nuklir berasal dari pengayaan uranium. Namun, prosesnya sangat berbeda dari yang dilakukan Korut pada tahun 1995, ketika program nuklirnya bergantung pada pemrosesan ulang plutonium. Sebelum ini, satu-satunya tanggung jawab Amerika Serikat adalah mengawasi keputusan yang dibuat oleh Organisasi Pengembangan Energi Semenanjung Korea (KEDO) untuk menghentikan suplai minyak ke Korut, yang diatur oleh Perjanjian Kerangka Kerja tahun 1994.

Sebagai hasilnya, pejabat AS terkejut dengan meningkatnya ketegangan ketika Korut kembali mengaktifkan proyek nuklir berbasis plutonium di Yongbyon pada akhir Desember 2002. Dan Korut juga melakukan pengusiran pejabat IAEA yang bertugas memantau penonaktifan fasilitas nuklir sesuai dengan Perjanjian Kerangka Kerja AS-Korea Utara. Setelah mengusir staf IAEA dari lokasi tersebut, Korea Utara mengumumkan rencananya untuk memulai kembali reaktor nuklir berkapasitas 5 megawatt pada tahun 2014. Langkah ini diambil dalam kerangka berbagai perjanjian dengan Amerika Serikat berdasarkan Kerangka Kerja yang Disetujui.

Korea Utara akhirnya meninggalkan NPT pada Januari 2003. Segera setelah Amerika Serikat mengetahui tindakan Korea Utara, mereka menghentikan pasokan bahan bakar mereka ke Korea Utara. Pada tahun berikutnya, Presiden Bush merasa Korea Utara menipu dia, dan dia merencanakan serangan terhadap fasilitas nuklir Korea Utara untuk mencegah Korea Utara melakukan apa pun lagi. Korea Utara mengancam untuk menguji coba rudal jarak jauh dan menyebarkan bahan nuklirnya ke berbagai negara, disebabkan merasa tidak lagi terikat dengan hukum. Tindakan membuka kembali fasilitas nuklir Yongbyon menunjukkan keseriusan Korea Utara dalam mengembangkan program nuklirnya, dengan melakukan penyempurnaan 8.000 batang bahan bakar. Dengan jumlah tersebut, Korea Utara bisa memproduksi antara empat hingga enam bom atom.

Pada awal tahun 2003, Presiden Bush mengusulkan pembentukan forum pembicaraan multilateral untuk membicarakan masalah nuklir Korea Utara melalui cara diplomatik sebelum pembentukan Six Party Talks. Setelah itu, diadakan pertemuan antara tiga negara yang dikenal sebagai Forum Trilateral Talks pada April 2003 di Beijing. Pertemuan ini melibatkan AS, Cina, dan Korea Utara (Mun, 2009). Pada awalnya, Korut hanya mau melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat saja untuk menyelesaikan masalah nuklir. Karena itu, Korut dengan tegas menolak usulan AS untuk membentuk kerangka multilateral sejak awal. Ini karena AS mencoba meyakinkan dunia melalui perundingan dengan tiga negara lain bahwa masalah nuklir

Semenanjung Korea adalah masalah internasional dan bahwa Korea Utara adalah penyebabnya.

Pada tahun 2003, perspektif Korea Utara berubah ketika mengetahui invasi AS ke Irak dan melihat keinginan Tiongkok untuk berunding. Terakhir, Korea Utara memberikan tanggapan positif terhadap diskusi mengenai masalah nuklir, yang harus diselesaikan secara multilateral. Juru bicara dari Kemenlu Korea Utara menyampaikan pada tanggal 12 April 2003 bahwa Korea Utara sedang mengupayakan dialog langsung dengan Amerika Serikat untuk menentukan apakah Amerika Serikat akan mengubah kebijakan politiknya untuk mengakhiri permusuhan terhadap Korea Utara. Jika Amerika Serikat tidak bersedia mengubah kebijakannya untuk menyelesaikan masalah nuklir, Korea Utara akan menolak untuk berbicara dengan Amerika Serikat lagi. Pada akhirnya, multilateralisme Korea Utara akan berubah karena posisi multilateralisme Amerika Serikat yang kuat, komitmen kebijakan Tiongkok untuk menyelesaikan masalah nuklir Korut, dan sikap Korut yang fleksibel.

Isu nuklir Korea Selatan dibahas dalam bentuk perundingan tripartit. Selama perundingan, Korea Utara secara terbuka menyatakan bahwa mereka mempunyai bom nuklir yang siap di uji coba dan mengancam untuk memberikan bahan nuklir ke negara-negara lain jika Amerika Serikat tidak memenuhi tuntutan mereka (Sanger, 2003). Korea Utara memberikan proposal melibatkan empat langkah kerja sama untuk mengakhiri proyek nuklirnya. Melanjutkan pengiriman bahan bakar minyak ke Korea Utara adalah langkah pertama, dan Korea Utara akan bersedia meninggalkan rencana senjata nuklirnya sebagai imbalannya.

Pada langkah berikutnya, Korut akan memberi tahu orang-orang tentang kemungkinan melakukan inspeksi pada proyek nuklir yang dimilikinya di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun sebagai gantinya, AS harus menandatangani pakta non-agresi tahun ini untuk menjamin keamanan Korea Utara. Pada tahap ketiga, langkah lain yang harus segera dipertimbangkan adalah normalisasi hubungan diplomatik antara AS dan Korut. Ini dianggap sebagai alternatif supaya menerima pembatasan internasional terhadap program misil Korea Utara. Cara terakhir adalah janji Korut untuk berhenti menggunakan senjata nuklir setelah reaktor air ringan untuk pembangkit listrik selesai dibangun.

Amerika Serikat menolak proposal Korea Utara untuk menyelesaikan isu nuklirnya. Kebijakan utama yang dipegang Amerika Serikat adalah hanya menerima perlucutan senjata yang dapat diverifikasi dan tidak dapat dibatalkan (CVID), seperti yang diungkapkan oleh ketua delegasi AS, James Kelly. Setelah tahap CVID diselesaikan, pembahasan mengenai pengaturan ekonomi dan politik dapat diadakan. Amerika Serikat telah menerapkan strategi tekanan dan perundingan dengan Korea Utara sejak perundingan trilateral di Beijing pada bulan April 2003. Amerika Serikat terus menyatakan keinginan untuk mencapai solusi diplomatik melalui proses multilateral yang melibatkan pihak lain yang berpartisipasi di wilayah tersebut.

Amerika Serikat mengambil tindakan ini karena percaya bahwa seluruh aktor regional sangat peduli dengan masalah perdamaian Semenanjung Korea. Pada saat yang sama, Amerika Serikat melakukan langkah-langkah diplomatik dan militer yang lebih keras untuk menghentikan Korut. Faktanya, Presiden AS pada saat itu melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Korsel, Perdana Menteri Jepang, dan Presiden Tiongkok supaya mendapatkan dukungan publik bagi Amerika Serikat dalam usahanya untuk mendorong Korea Utara menghentikan program nuklirnya.

Korea Utara tetap tidak menerima tuntutan Amerika Serikat untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya sebelum perundingan dimulai. Korea Utara

mengatakan bahwa Amerika Serikat mendorong perlucutan senjata nuklir mereka untuk melemahkan mereka. Selain itu, Korea Utara menegaskan bahwa mereka berhak memiliki sistem pertahanan nuklir untuk melindungi diri mereka sendiri. Lebih lanjut, mereka percaya bahwa AS dan Korut harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik nuklir mereka. Sebuah pernyataan dari juru bicara KEMENLU Korut mengatakan bahwa Korea Utara dan Amerika Serikat telah setuju untuk mengadakan konsultasi bilateral dalam konteks Pertemuan Tujuh Partai (KCNA, 2003).

Dengan perjanjian ini, Korea Utara berharap dapat melakukan diskusi bilateral dengan Amerika Serikat tentang masalah nuklir jika diperlukan. Akibatnya, Six-Party Talks tidak hanya memberi Korea Utara kesempatan untuk berunding bilateral, tetapi juga memberi Amerika Serikat kesempatan untuk lebih memahami maksud Korea Utara. Namun, tidak ada kemajuan yang dicapai dalam perundingan trilateral mengenai masalah pengembangan nuklir Korea Utara.

Ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem kekuasaan bersama, seperti yang disepakati untuk membentuk Forum Permusyawaratan Tripartit, beroperasi dengan tidak formal. Tapi Forum Kekuatan yang disepakati bersama berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur dan menyeimbangkan berbagai aktivitas dan kepentingan anggotanya melalui pertemuan rutin dan metode lainnya. Pada pertemuan akhir Trilateral Talks, disepakati untuk membuat suatu forum multilateral yang dikenal sebagai Six Party Talks. Forum ini melibatkan enam negara: Amerika Serikat, Korea Utara, Tiongkok, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan. Six Party Talks memainkan peran kunci dalam upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan terkait masalah nuklir Korea Utara.

Perundingan Six-Party Talks

Pada awalnya peluncuran nuklir Korea Utara dengan dukungan Soviet, Amerika Serikat telah menyatakan kekhawatirannya terhadap pengembangan program nuklir negara tersebut. AS memakai berbagai macam cara agar Korut mau menghentikan proyek nuklirnya, termasuk menerapkan sanksi ekonomi terhadap negara tersebut. Salah satu pendekatan utama yang digunakan Amerika Serikat adalah melalui diplomasi, baik dalam bentuk negosiasi bilateral maupun dalam forum multilateral seperti Six-Party Talks.

Sejak awal, Six-Party Talks memiliki tujuan untuk mengakhiri proyek nuklir Korut melalui pembicaraan. Proses ini dimulai dengan konsultasi trilateral yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah nuklir Korea Utara. Sebagai respons terhadap keluarnya Korut dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir pada Januari 2003, pembicaraan dimulai (Gershman 2005). Pembentukan forum ini tidak hanya merupakan hasil dari upaya Amerika Serikat, tetapi juga peran Tiongkok. Keterlibatan Tiongkok dalam proses pembentukan Six-Party Talks mendorong kemajuannya. Pemerintah Tiongkok terus mendorong semua pihak yang terlibat untuk terus menyelesaikan konflik nuklir Korea Utara secara damai di bawah rangka kerja Six-Party Talks.

Kerja sama yang dilakukan AS- Tiongkok terhadap masalah nuklir Korut menunjukkan pergeseran tanggung jawab global dan regional yang dilakukan oleh dua kekuatan regional yang sangat penting (Kim 2006). Pada bulan Agustus 2003, dibentuklah struktur multilateral kedua, Six-Party Talks, sebagai wadah diplomasi dengan tujuan mengakhiri masalah nuklir Korea Utara. Di Beijing, dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2003, diadakan putaran pertama Six-Party Talks. Dalam putaran pertama, topik yang dibicarakan masih berkaitan dengan tujuan Six-Party Talks dan dasar-dasarnya. Topik yang dibahas juga mencakup detail teknis yang diperlukan

untuk mencapai konsensus tentang proses denuklirisasi, serta pendekatan dialog untuk menyelesaikan konflik nuklir dan masalah nuklir Korea Utara.

Pada pertemuan pertama, Amerika Serikat juga meminta Korea Utara untuk menyelesaikan program nuklirnya sebelum diskusi lebih lanjut dimulai. Namun, Korea Utara membantah bahwa sikap Amerika Serikat menyebabkan program nuklirnya muncul dan menimbulkan permusuhan terhadap Korea Utara. Oleh karena itu, Korea Utara meminta Amerika Serikat supaya menghentikan permusuhan terhadap Korea Utara dan menerapkan tindakan yang diperlukan dalam kerangka Prinsip Aksi Bersama. Pada tanggal 25 dan 28 Februari 2004, pertemuan dua belah pihak kembali diadakan di Beijing. Pada putaran kedua, Amerika Serikat meminta Korea Utara untuk menghentikan upaya pengayaan uraniumnya, yang dibuat dengan bantuan Pakistan.

Selain itu, AS kembali menegaskan pada Korea Utara supaya mereka harus segera menghentikan program nuklirnya secara menyeluruh, dapat divalidasi, dan tidak dapat diubah. Namun, bantuan energi dari Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, atau Rusia ke Korea Utara tidak akan ditolak oleh Amerika Serikat. Tetapi Korea Utara membantah klaim AS terkait program uranium miliknya. Korea Utara bersikeras untuk mengembangkan lebih lanjut program nuklirnya untuk hal damai. Korea Utara juga meminta bantuan ekonomi sebagai ganti penghentian program nuklirnya. Pada ronde kedua, seluruh anggota juga mencapai konsensus untuk membentuk kelompok kerja untuk mengatur pertemuan berikutnya.

Tiongkok mengeluarkan pernyataan resmi pada hari terakhir konferensi melalui ketua Konferensi Konsultatif yang beranggotakan enam negara. Berdasarkan pernyataan tersebut, Presiden Konferensi menyatakan bahwa negara-negara peserta Six Party Talks tampaknya mulai memahami posisi masing-masing melalui dialog berdasarkan semangat saling menghormati dan melalui perundingan setara, Tiongkok sangat menghargai hasil pertemuan ke-2 sebagai pencapaian penting pendekatan multilateral.

Selanjutnya tanggal 23-26 Juni 2004, dilaksanakan putaran ke-3 dari pembicaraan tersebut. Pada putaran ini, Amerika Serikat mengajukan dua opsi kepada Korea Utara. Pertama, AS memberi Korea Utara waktu tiga bulan untuk merundingkan pembongkaran total fasilitas nuklir milik Korea Utara. Hal ini termasuk menghentikan pengayaan uranium yang telah dikembangkan Korea Utara. Korut akan menerima pasokan minyak dari negara yang terlibat dalam pembicaraan Six-Party Talks selama tahap proyek tersebut diselesaikan. Selain itu, Amerika Serikat menawarkan jaminan keamanan sementara kepada Pyongyang. Dalam opsi pertama, Korea Utara akan menerima bantuan dan bahan bakar sebagai tahap persiapan selama 3 bulan untuk mengakhiri proyek nuklirnya. Sedangkan dalam pilihan kedua, Amerika Serikat berkomitmen untuk menghapus seluruh proyek nuklir yang dimiliki Korut, menjamin keamanan secara permanen, meningkatkan hubungan bilateral, dan memberikan bantuan ekonomi yang lebih luas. Pada konferensi tingkat tinggi, Amerika Serikat menerima proposal ini.

Seperti biasa, Korea Utara terus menolak tuduhan Amerika Serikat tentang pengayaan uranium di wilayahnya. Namun, Korea Utara tampaknya semakin terbuka untuk negosiasi. Itu akan membongkar seluruh fasilitas nuklirnya jika AS bersedia memberikan bantuan energi sebesar 2 juta kilowatt, mencoret Korea Utara dari daftar negara penyokong terorisme, mengakhiri sanksi ekonomi, serta memberikan reparasi lebih lanjut. Untuk mengakhiri krisis nuklir Korea Utara, pertemuan putaran keempat kedua di Beijing, yang berlangsung dari 13 hingga 19 September 2005, menghasilkan Deklarasi Bersama, atau pernyataan bersama. Pada 19 September, pernyataan bersama

menyatakan bahwa semua pihak setuju untuk menyiapkan Semenanjung Korea yang damai dan bebas senjata nuklir.

Selain itu, semua pihak berkomitmen untuk bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas permanen di Asia Timur. Meja perundingan menjadi jauh lebih buruk setelah pertemuan berakhir. Korea Utara marah karena sanksi Amerika Serikat kepada Perusahaan Korea Utara Banco Delta Asia (BDA) Makau. Korea Utara menolak untuk berpartisipasi dalam perundingan, dan pada tanggal 9 Oktober 2006 mereka melakukan pengujian kembali rudal balistik dan nuklir. Sebagai respons, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1718, yang menyerukan kepada Korut untuk menghentikan pengujian nuklir dan penggunaan senjata pemusnah massal. Meskipun demikian, Korut tetap melakukan kembali melakukan pengujian nuklir.

Perundingan Enam Pihak pada tahun 2006 melibatkan AS dan Korut dalam pertemuan bilateral untuk menyelesaikan masalah Banco Delta Asia (BDA) yang berlarut-larut di Macau. Dengan dukungan Tiongkok, Korea Utara akhirnya setuju untuk bergabung kembali dalam Perundingan Enam Pihak. Dengan kembalinya Korea Utara ke perundingan, seluruh negara peserta berharap masalah BDA dapat diselesaikan secepatnya.

Bertempat di Beijing tahap ke-3 dari sesi ke-5 dari tanggal 8-13 Februari 2007, dicapai kesepakatan tentang "Langkah-Langkah Implementasi Awal dari Deklarasi Bersama 19 September (Perjanjian 13 Februari)". Tujuan dari perundingan yang dikenal sebagai "Perjanjian Beijing" adalah untuk melakukan langkah pertama menuju pada penghentian rencana senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Dalam Perjanjian di Beijing tanggal 13-02-2007, Six-Party Talks menyatakan bahwa setiap pihak akan melakukan tindakan bersama untuk secara progresif menerapkan Deklarasi Bersama. Perjanjian tersebut juga menegaskan kembali betapa pentingnya upaya multilateral.

Pada tanggal 19-22 Maret 2007, dilaksanakan putaran keenam perundingan enam pihak. Lima laporan kelompok kerja dibahas pada kesempatan ini termasuk rencana denuklirisasi. Deklarasi Bersama tentang Denuklirisasi Tahap Kedua diterbitkan pada sesi kedua dari putaran keenam tersebut pada 3 Oktober 2007. Salah satu tujuan perjanjian ini adalah untuk menetapkan prosedur dekomisioning proyek nuklir Korut. Secara keseluruhan, Perjanjian Beijing tanggal 3 Oktober 2007 adalah contoh keberhasilan kerja sama antara beberapa negara. Pada 13 Maret 2007, Mohamed ElBaradei, direktur IAEA, bertemu dengan kepala departemen energi atom Korea Utara, Ri Je Son. ElBaradei mendorong Korut supaya bergabung kembali dengan IAEA dan membahas tentang pengawasan serta verifikasi yang akan dilakukan sesuai dengan keputusan Six Party Talks pada 13 Februari.

Pada Juni 2007, IAEA menyetujui penutupan dan pengamanan reaktor nuklir Yongbyon 5 megawatt. Dari September hingga Oktober 2007, terjadi tiga sesi putaran keenam. Penutupan tiga fasilitas nuklir utama di kompleks Yongbyon termasuk dalam rencana implementasi tahap kedua yang disepakati. Korea Utara berjanji untuk tidak mentransfer bahan, teknologi, atau pengetahuan nuklirnya kepada negara lain. Sebagai bagian dari upaya untuk normalisasi diplomatik, anggota Six Party Talks lainnya setuju meningkatkan pasokan bantuan ke Korea Utara sebesar satu juta ton bahan bakar minyak.

Pada 3 Oktober 2007, setelah mencapai kesepakatan, Korea Utara menutup semua program nuklirnya dan menutup fasilitasnya sesuai dengan perjanjian tersebut. Laporan ini disampaikan kepada China pada 26 Juni 2006 (Kimball 2012). Pada 15 Juli 2008, selama negosiasi lebih lanjut, Amerika Serikat mengusulkan gagasan protokol

verifikasi yang mencakup pemeriksaan semua aspek proyek nuklir Korut, seperti pengayaan uranium, senjata, dan penyebaran teknologi nuklir. Protokol ini juga mencakup akses ke lokasi yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan oleh Korea Utara. Namun, seminggu setelahnya, Korea Utara menolak gagasan tersebut, menurut Christopher Hill, Asisten Menteri Luar Negeri AS.

Korea Utara kemudian mengusulkan protokol mereka sendiri, tetapi Amerika Serikat merasa bahwa proposal awal tersebut tidak memadai (Kimball 2012). Akhirnya, tercapai kesepakatan untuk melakukan verifikasi pada 15 proyek nuklir yang dilaporkan dan situs lain yang disepakati bersama. Namun, ada masalah terkait penundaan pencoretan Korut dari daftar negara penyokong terorisme oleh AS, yang hanya dilakukan setelah semua anggota menyetujui perjanjian verifikasi. Korea Utara mengumumkan akan melanjutkan pembongkaran fasilitas nuklirnya setelah AS menghapusnya dari daftar negara pendukung terorisme. Namun sebulan kemudian, Korea Utara tidak memberikan kepada pengawas IAEA izin untuk mengambil sampel dari proyek nuklirnya dan membatasi pemeriksaan di pada lokasi tertentu.

Ketegangan baru muncul karena masalah verifikasi yang tertunda. Amerika Serikat menyarankan verifikasi setiap situs nuklir di Korea Utara, tetapi Korea Utara menolak dan mengatakan hanya Yongbyon yang akan diperiksa. Tidak ada kesepakatan karena Korut menolak untuk membongkar program nuklirnya. Pada November 2008, Korea Utara menarik kembali komitmennya secara lisan untuk mengumpulkan sampel di Yongbyon, yang menyebabkan berakhirnya. Korea Utara kemudian keluar dari Six Party Talks pada 14 April 2009 dan mengundurkan diri dari perjanjian sebelumnya (Kimball 2012). Setelah mengundurkan diri dari Six Party Talks, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir kembali pada 25 Mei 2009, yang menuai kecaman dari komunitas internasional.

Hasil dan Dampak Six-Party Talks

- 30 Agustus 2003: Korea Utara mengumumkan rencana uji coba senjata nuklir
- 29 Agustus 2003: Enam poin konsensus dicapai pada pembicaraan enam pihak
- 1 Maret 2004: Negara-negara menegaskan kembali komitmennya pada akhir Putaran Kedua
- 26 Juli 2005: Amerika Serikat menyatakan "tidak ada niat" untuk menginvasi Korea Utara
- 10 Juli 2005: Korea Utara mengumumkan akan bergabung kembali dalam perundingan
- 19 September 2005: Korea Utara mengumumkan penghentian upaya nuklirnya.
- 14 Oktober 2006 Resolusi 1718 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB
- 13 Februari 2007: Para pihak menyepakati tindakan awal untuk melaksanakan pernyataan bersama
- 18 Juli 2007: IAEA menyatakan reaktor Yongbyon ditutup dan disegel
- 12 Juli 2008: Para pihak menegaskan kembali perlunya sistem verifikasi
- 26 Agustus 2008: Korea Utara mengumumkan akan membatalkan tindakan penonaktifannya
- 13 April 2009: Uji coba rudal Korea Utara dikecam oleh Dewan Keamanan PBB.
- 14 April 2009: Korea Utara memutuskan untuk meninggalkan perundingan enam pihak.

Keterlibatan enam negara dalam perundingan Six Party Talks didasarkan pada hubungan mereka satu sama lain dalam masalah yang diperdebatkan. Salah satu manfaat utama Six Party Talks adalah kemampuan mereka untuk mengumpulkan semua pihak yang terlibat secara langsung dalam forum yang tepat untuk berbicara tentang rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea.

Six Party Talks mencapai pencapaian utama dengan menyetujui penghentian proyek nuklir Korut, seperti tercantum dalam Pernyataan Bersama pada 19 September 2005. Selain itu, mereka juga berhasil dalam normalisasi hubungan antara anggota Six Party Talks, terutama dalam hubungan yang sering berubah-ubah seperti antara Korut dengan AS, Korut dan Korsel, serta Korut dan Jepang. Six Party Talks berinisiatif membuat Korut mau meninggalkan proyek nuklirnya dengan mempromosikan kerja sama ekonomi dalam bidang energi dan perdagangan. Mereka bahkan menyatakan niatnya untuk menawarkan bantuan energi kepada Korea Utara guna memastikan bahwa kawasan Semenanjung Korea dan Asia Timur tetap aman.

Untuk mencapai tujuan utama mereka, yaitu denuklirisasi Korea Utara, pembicaraan multilateral yang terdiri dari Six Party Talks, telah melalui berbagai proses perundingan yang panjang. Terdapat sejumlah kesepakatan bersama yang dicapai selama perundingan antara enam belah pihak; salah satunya adalah Pernyataan Bersama 19 September 2005, yang kemudian diterapkan dalam Perjanjian Beijing 13 Februari 2007 dan Perjanjian 3 Oktober 2007. Secara keseluruhan, tiga kesepakatan ini merupakan pencapaian yang signifikan bagi Six Party Talks.

Pembicaraan Enam Pihak yang berlangsung dari tahun 2003 hingga 2009 memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan isu nuklir Korea Utara melalui berbagai kesepakatan yang dicapai. Kontribusi tersebut mencakup menjadi platform untuk diplomasi dan negosiasi, mendorong penghentian program nuklir Korea Utara, meningkatkan hubungan antar anggota, mempererat kerja sama dengan Korea Utara, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan Asia Timur. Pembicaraan Enam Pihak dianggap efektif dalam mendorong penyelesaian masalah nuklir Korea Utara melalui dialog multilateral yang menekankan resolusi damai. Namun, dari tahun 2003 hingga 2009, pembicaraan ini belum berhasil mencapai denuklirisasi sepenuhnya, dengan pencapaian yang diraih hanya bersifat sementara.

Pembicaraan Enam Pihak telah berusaha membangun kembali dialog antara pihak yang bertikai dengan semangat solidaritas, meskipun hasilnya belum signifikan. Selain itu, Pembicaraan Enam Pihak berhasil membawa negara-negara yang terlibat dalam masalah nuklir Korea Utara ke meja perundingan antara tahun 2003 dan 2009. Diharapkan pertemuan ini memberikan pelajaran penting tentang penyelesaian masalah melalui negosiasi dan menjadi landasan bagi forum multilateral lainnya di masa depan.

Kontribusi Pembicaraan Enam Pihak belum berhasil menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara sepenuhnya. Berbagai hambatan, seperti konflik kepentingan antar anggota, pengaruh Ide Juche dan Kebijakan Songun, serta kurangnya aturan yang mengikat, menghalangi proses denuklirisasi Korea Utara. Meskipun demikian, selama enam tahun perundingan, Pembicaraan Enam Pihak dianggap berhasil mencapai perdamaian dan menghentikan agresi nuklir Korea Utara, yang ditunjukkan dengan penutupan beberapa instalasi nuklir pada tahun 2007.

Walaupun Pembicaraan Enam Pihak telah berupaya mencapai denuklirisasi, mereka belum berhasil menghentikan program nuklir Korea Utara sepenuhnya. Korea Utara terus mengembangkan program nuklirnya hingga akhirnya keluar dari Pembicaraan Enam Pihak pada April 2009, yang mengakhiri pembicaraan tersebut.

Keluarnya Korea Utara dan usaha mereka untuk kembali mengembangkan program nuklir memberikan tantangan baru bagi Pembicaraan Enam Pihak untuk menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. Tindakan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan regional dan global.

KESIMPULAN

Perundingan Six-Party Talks adalah upaya diplomatik, tujuan dari perundingan yang berlangsung dari tahun 2003 hingga 2009 adalah untuk mencapai solusi damai untuk masalah pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Upaya ini mencerminkan pendekatan multilateral yang bertujuan mengatasi ancaman proliferasi nuklir serta mencari stabilitas dan perdamaian di kawasan Semenanjung Korea. Meskipun perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan akhir yang konkret, mereka memainkan peran penting dalam upaya diplomatik untuk denuklirisasi Semenanjung Korea.

Six-Party Talks mencerminkan prinsip liberalisme melalui pendekatan kerjasama multilateral, diplomasi, dan norma-norma internasional untuk mencapai denuklirisasi dan stabilitas regional. Konsep interdependensi terlihat dalam bagaimana negara-negara peserta saling bergantung dalam hal keamanan bersama, ekonomi, dan kebijakan internasional. Dalam perundingan ini, setiap negara memiliki kepentingan yang saling terkait dan memahami bahwa ancaman nuklir di Korea Utara tidak hanya menjadi masalah bagi satu negara saja, tetapi juga berpotensi mengganggu perdamaian dan stabilitas global.

Perundingan ini menunjukkan bahwa melalui kerjasama dan saling ketergantungan, negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai keamanan dan perdamaian global. Proses perundingan yang melibatkan berbagai negara dengan kepentingan yang berbeda ini menggambarkan pentingnya dialog dan komunikasi dalam diplomasi internasional. Selain itu, Six-Party Talks juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik internasional membutuhkan komitmen dan usaha yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, Six-Party Talks tidak hanya bertujuan untuk mengatasi isu nuklir semata, tetapi juga untuk memperkuat hubungan diplomatik antara negara-negara peserta. Melalui perundingan ini, tercipta sebuah platform dimana negara-negara dapat berbagi pandangan, membangun kepercayaan, dan mencari solusi bersama terhadap masalah keamanan regional. Oleh karena itu, meskipun tidak mencapai hasil yang diinginkan, Six-Party Talks tetap merupakan contoh penting dari bagaimana diplomasi multilateral dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di dunia yang kompleks dan saling terhubung ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baldwin, D. A. (1993). *Neorealism and neoliberalism: The contemporary debate*. New York, NY: Columbia University Press. <https://cup.columbia.edu/book/neorealism-and-neoliberalism/9780231084411> diakses 7 Juni 2024.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton, NJ: Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691122489/after-hegemony> diakses 6 Juni 2024.
- Nye, J. S. (1988). *Neorealism and neoliberalism*. World Politics. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. <https://www.cambridge.org/core/journals/world->

politics/article/abs/neorealism-and-neoliberalism/BCFED5D404A61C2C3D78ACBC50A12C834 diakses 6 Juni 2024.

Santosa, T. (2014). *Diplomasi multilateral six party talks dalam proses denuklirisasi Korea Utara periode 2003-2009*. Jakarta. UIN Repository. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24247?mode=full> diakses 7 Juni 2024.

Jurnal

Muhamad V. (2016) *Isu Keamanan di Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen*. Vol. 3 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/1120/613> diakses 8 Juni 2024.

Nabil M. (2014) *Diplomasi Multilateral Six Party Talks Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara*. Vol. 2 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24247/1/Skripsi%20Muhammad%20Nabil.pdf> diakses 6 Juni 2024.

Wahyuningtyas (2023) *Kegagalan Forum Multilateral Six Party Talks Dalam Upaya Mewujudkan Denuklirisasi Atas Isu Nuklir Korea Utara*. Vol. 2 <https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/814> diakses 6 Juni 2024.

Website

Albert, E. (2018). *North Korean nuclear negotiations*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations> diakses 6 Juni 2024.

Arms Control Association. (2014). *Chronology of U.S.-North Korean nuclear and missile diplomacy, 1985-2022*. <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron> diakses 8 Juni 2024.

Auliya, H. (2015). *Keterlibatan Amerika Serikat dalam Six Party Talks pada Masa Pemerintahan Presiden George W. Bush dan Presiden Barack Obama*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/86221> diakses 6 Juni 2024.

Author, J. Y. H. (2020). *Perkembangan Literatur mengenai Six-Party Talks = The Growth of Literature regarding Six-Party Talks*. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20506368&lokasi=lokal> diakses 8 Juni 2024.

Bajoria, J. (2013). *The six party talks on North Korea's nuclear program*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounders/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program> diakses 7 Juni 2024.

BBC News Indonesia. (2010). *Korut ingin balik ke meja perundingan*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/08/100802_northkorea diakses 8 Juni 2024.

Crisis Group (2018). *North Korea: Beyond the Six-Party Talks* <https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/korean-peninsula/north-korea-beyond-six-party-talks> diakses 7 Juni 2024.

Daven K. (2013) *The Six-Party talks at a glance* | Arms Control Association. (n.d.). <https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks> diakses 6 Juni 2024.

Fitriani A. (2013). *Butuh Waktu untuk Memulai Lagi Perundingan Enam Pihak*. <https://rmol.id/dunia/read/2013/11/16/133455/butuh-waktu-untuk-memulai-lagi-perundingan-enam-pihak> diakses 7 Juni 2024.

Khotib, M. A. (2013). *Keputusan Korea Utara Keluar dari Six Party Talks Tahun 2009 (NORTH KOREA'S DECISION WITHDREW FROM SIX PARTY TALKS 2009)*. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/9284?show=full> diakses 6 Juni 2024.

Kremlin (2019). *Six Party Talks Cara paling efektif untuk masalah Semenanjung Korea*. <https://rmol.id/dunia/read/2019/04/25/387442/kremlin-six-party-talks-cara-paling-efektif-untuk-masalah-semenanjung-korea> diakses 8 Juni 2024.

Munandar, A. (2006). *Penggunaan Issues Linkage dalam Perundingan: Studi Kasus Six-Party dalam Krisis Nuklir Korea Utara*.

- <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/120479> diakses 8 Juni 2024
- Rebecca A. (2009). Peranan six party talks dalam upaya penyelesaian masalah senjata nuklir Korea Utara. <https://repository.unikom.ac.id/14537/> diakses 7 Juni 2024.
- Redaksi, T. (2014). AS dan Korsel Ajak Korut Kembali ke Six Party. <https://m.jpnn.com/news/as-dan-korsel-ajak-korut-kembali-ke-six-party> diakses 8 Juni 2024.
- Richard S. (2017). Perundingan enam negara. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Perundingan_enam_negara diakses 8 Juni 2024.
- Roshydin M. (2021) Mengapa Negosiasi Internasional Gagal? Menjelaskan Kegagalan Perundingan Denuklirisasi Amerika Serikat- Korea Utara 2019. https://www.researchgate.net/publication/358620610_Mengapa_Negosiasi_Internasional_Gagal_Menjelaskan_Kegagalan_Perundingan_Denuklirisasi_Amerika_Serikat-Korea_Uta_2019 diakses 6 Juni 2024.
- Toloraya G. (2013) The Six Party Talks: A Russian Perspective on JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/42704653> diakses 9 Juni 2024.
- UMM (2011). Nuklir Korut dan Iran Harus Diakhiri - Internasional. <https://www.umm.ac.id/id/international/nuklir-korut-dan-iran-harus-diakhiri.html>. <https://www.umm.ac.id/id/international/nuklir-korut-dan-iran-harus-diakhiri.html> diakses 7 Juni 2024.
- US Departemen of State (2017) Six-Party talks, Beijing, China. (n.d.). <https://2009-2017.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm> diakses 7 Juni 2024.
- Viva (2011). Indonesia dorong digelarnya Six Party Talk. VIVA. <https://www.viva.co.id/berita/dunia/222307-indonesia-dorong-digelarnya-six-party-talk> diakses 7 Juni 2024.